

**PUSKESMAS MAKROMAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESI**  
**METODE LANGSUNG**

No	Uraian	202
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	
3	Pendapatan APBD	570,405,336.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	874,599,361.00
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama	-
7	Pendapatan Hibah	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya	544,134.51
9	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1,445,548,831.51</b>
10	<b>Arus Keluar Kas</b>	
11	Pembayaran Pegawai	100,519,278.00
12	Pembayaran Persediaan	219,755,488.00
13	Pembayaran Jasa	879,660,545.00
14	Pembayaran Pemeliharaan	40,932,868.00
15	Pembayaran Langganan Daya dan jasa	33,266,600.00
16	Pembayaran Perjalanan Dinas	18,212,042.00
17	Pembayaran Bunga	-
18	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1,292,346,821.00</b>
19	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>	<b>153,202,010.51</b>
20	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
21	<b>Arus Masuk Kas</b>	
22	Penjualan atas Tanah	-
23	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-
24	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-
25	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
26	Penjualan Aset Tetap	-
27	Penjualan Aset Lainnya	-
28	Penerimaan dari Divestasi	-
29	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Seku	-
30	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-
31	<b>Arus Keluar Kas</b>	
32	Perolehan Tanah	-
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	57,919,486.00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	-
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-
37	Perolehan Aset Lainnya	-
38	Pengeluaran Penyertaan Modal	-
39	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Seku	-
40	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>57,919,486.00</b>
41	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>	<b>(57,919,486.00)</b>

42	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
43	<b>Arus Masuk Kas</b>		
44	Penerimaan Pinjaman		-
45	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		-
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-
47	<b>Arus Keluar Kas</b>		
48	Pembayaran Pokok Pinjaman		-
49	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain		-
50	Penyetoran ke Kas Daerah		-
51	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-
52	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>		-
53	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
54	<b>Arus Masuk Kas</b>		
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51,369,189.00	
56	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>51,369,189.00</b>	
57	<b>Arus Keluar Kas</b>		
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51,369,189.00	
59	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>51,369,189.00</b>	
60	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>		-
61	Kenaikan/Penurunan	<b>95,282,524.51</b>	
62	Saldo Awal Kas	<b>55,304,507.38</b>	
63	Saldo Akhir Kas	<b>150,587,031.89</b>	
			150,587,031.89

.....

.....

Nip .....

EMBER 2023

<b>2023</b>
457,262,000.00
780,507,928.38
-
-
-
<b>1,237,769,928.38</b>
-
64,566,924.00
448,799,262.00
455,742,270.00
81,427,000.00
16,589,550.00
-
-
<b>1,067,125,006.00</b>
<b>170,644,922.38</b>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
131,607,082.00
-
-
-
-
-
-
<b>131,607,082.00</b>
<b>(131,607,082.00)</b>

-
-
-
-
-
-
-
-
51,369,189.00
<b>51,369,189.00</b>
51,369,189.00
<b>51,369,189.00</b>
-
<b>39,037,840.38</b>
<b>16,266,667.00</b>
<b>55,304,507.38</b>
(95,282,524.51)

.....  
 Direktur

.....  
 .....

---

## **I. Pendahuluan**

Untuk mewujudkan manajemen Puskesmas yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan tra akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional Puskesmas harus dapat di media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal da

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai ] pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menent

Adapun tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cuk
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya el
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan c
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Puskesmas mendanai seluruh
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Puskesmas berkaitan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Puskesmas pelaporan.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada:

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Le nomor 4355);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebag Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In
3. Peraturan Pemerintah nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
5. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi I Republik Indonesia nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun 2015);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Laya

### 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samar

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

### 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda Berbasis

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

#### Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja program Puskesmas

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

#### Bab IV Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Puskesmas sebagai entitas pelaporan.
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang

#### Bab V Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan
  - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - 5.1.1.1 Pendapatan
    - 5.1.1.2 Belanja
  - 5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.1.3 Neraca
    - 5.1.3.1 Aset
    - 5.1.3.2 Kewajiban
    - 5.1.3.3 Ekuitas
  - 5.1.4 Laporan Operasional (LO)
    - 5.1.4.1 Pendapatan

	5.1.4.2	Beban Operasional
	5.1.4.3	Beban Non Operasiona
5.1.5		Laporan Arus Kas (LAK)
	5.1.5.1	Arus Kas Aktivitas Op
	5.1.5.2	Arus Kas Aktivitas Inv
	5.1.5.3	Arus Kas Aktivitas Per
	5.1.5.4	Arus Kas Aktivitas Tra
5.1.6		Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan		
Bab VII Penutup		

## I. Ekonomi Makro

### 2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu j pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimor

Salah satu indikator makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil PDRB kabupaten/ kota menurut lapangan usaha (*Industrial Origin*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar (2010). PDRB atas dasar harga be digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) merupakan salah satu indikator yang dapat Oleh karena itu, sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih dipakai untuk meman secara makro karena menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflati*

Sesuai dengan panduan dari buku "*The System of National Account 1993 (SNA)*", per ekonomi dengan migas dan tanpa migas.

**Tabel 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bru**  
**Kota Samari**

Tahun	Atas Da
2014	95,030
2018	
2019	
2020	

2021

2022

---

*Sumber : BPS Kota Samarinda 2023*

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### 1. Pendapatan dan Beban

#### a. Pendapatan Operasional

1) Jasa layanan

Berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan ya

2) Hibah

Berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3) Hasil kerjasama dengan pihak lain

Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa :

4) APBD

Berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredi

5) APBN

Berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah da

Seluruh pendapatan Puskesmas kecuali pendapatan hibah te  
Pendapatan hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.

Seluruh pendapatan Puskesmas dilaksanakan melalui rekenin  
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Pus

#### b. Beban Operasional

1) Beban pegawai;

2) Beban persediaan;

3) Beban jasa;

4) Beban pemeliharaan;

5) Beban langganan daya dan jasa;

6) Beban perjalanan dinas;

7) Beban penyusutan dan amortisasi;

8) Beban bunga; dan

9) Beban lain-lain.

#### c. Kegiatan Non Operasional

1) Surplus/defisit penjualan aset non lancar;

2) (Kerugian) penurunan nilai aset; dan

3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainny

#### d. Pos Luar Biasa

1) Pendapatan luar biasa; dan

2) Beban luar biasa.

Seluruh pengeluaran dari pendapatan non APBD/APBN disampaikan ke

volume kegiatan pelayanan. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pusk SKPD.

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dengan mempe Puskesmas oleh BPKAD. Persentase ambang batas tertentu merupakan kebi

## 2. Pengelolaan Kas

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari r

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan:

- a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. Pembayaran;
- e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; c
- f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh per

Penerimaan Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening

## 3. Pengelolaan Piutang dan Utang

### a. Piutang

Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan p kegiatan Puskesmas.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskes

Untuk melaksanakan penagihan piutang, Puskesmas menyiag piutang yang sulit ditagih dapat dllimpahkan penagihannya ke

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh p ditetapkan dengan peraturan bupati, dengan memperhatikan ke

### b. Utang

Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan de pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka pan

Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonor

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinj

pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang dengan persetujuan bupati. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat peraturan bupati.

Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati.

#### 4. Investasi

Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi perkembangan kesehatan masyarakat dan keuangan Puskesmas. Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
- c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan bupati. Investasi jangka panjang, antara lain:

- a. Penyertaan modal;
- b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Dalam hal Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, Puskesmas harus memperhatikan ketentuan peraturan bupati.

Hasil investasi merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas

#### 5. Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain yang ekonomis dan saling menguntungkan.

Kerjasama dengan pihak lain, antara lain:

- a. Kerjasama operasi  
Kerjasama operasi merupakan perikatan antara Puskesmas dan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Sewa menyewa  
Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemertahanan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara bertahap.
- c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.  
Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas

#### 6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Puskesmas dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif.

Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan anggaran pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumbernya

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur Puskesmas harus sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kondisi Puskesmas.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemerintah.

Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Puskesmas. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang diperlukan.

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan :

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya langsung maupun tidak langsung.
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pe

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai

#### 7. Pengelolaan Barang

Barang inventaris milik Puskesmas dapat dihapus dan/atau dialihkan ke inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual,

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan keuangan Puskesmas.

Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan pengalihan aset tetap merupakan pendapatan Puskesmas dan diungkapkan dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan t

Tanah dan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah dan fungsi Puskesmas, dapat dialihgunakan oleh Direktur Puskesmas deng

#### 8. Surplus dan Defisit Anggaran

Surplus anggaran Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pend

Surplus anggaran Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Defisit anggaran Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi penc

Defisit anggaran Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada ta

#### 9. Penyelesaian Kerugian

Kerugian pada Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar huku penyelesaian kerugian daerah.

#### 10. Perencanaan dan Penganggaran

##### a. Perencanaan

Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang me tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Puskesmas. Visi ingin diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemba bidangnya dan berhasil dengan baik.

Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dila dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian ki kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) dipergunakan sebagai dasar peny

##### b. Penganggaran

Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas la berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas.

- 1). Kinerja tahun berjalan;
- 2). Asumsi makro dan mikro;
- 3). Target kinerja;
- 4). Analisis dan perkiraan biaya satuan;
- 5). Perkiraan harga;
- 6). Anggaran pendapatan dan biaya;
- 7). Besaran persentase ambang batas;
- 8). Prognosa laporan keuangan;
- 9). Perkiraan maju (forward estimate);
- 10). Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- 11). Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolida:

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayar

Kinerja tahun berjalan meliputi:

- 1) Hasil kegiatan usaha;
- 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja;
- 3) Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- 4) Laporan keuangan tahun berjalan; dan
- 5) Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan

Asumsi makro dan mikro antara lain:

- 1). Tingkat inflasi;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Nilai kurs;
- 4). Tarif; dan
- 5). Volume pelayanan.

Target kinerja antara lain:

- 1). Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- 2). Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraan biaya satuan merupakan perkiraan biaya komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan di

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk baru tercermin dari tarif layanan.

Anggaran pendapatan dan biaya merupakan rencana anggaran pendapatan dan biaya.

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keu

Perkiraan maju (*forward estimate*) merupakan perhitungan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan

Rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana peng

Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan format Pemerintah Daerah.

RBA disampaikan kepada BPKAD. RBA disampaikan kepada D Puskesmas disampaikan kepada BPKAD.

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas oleh BPKAD disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan

## 11. Pelaksanaan Anggaran

### a. DPA-Puskesmas

DPA-Puskesmas mencakup antara lain:

- 1). Proyeksi pendapatan dan beban;
- 2). Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan
- 3). Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan

BPKAD mengesahkan DPA-Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan DPA-Puskesmas belum disahkan oleh BPKAD, Puskesmas dan Puskesmas yang telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penyusunan

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (mismatch) yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang

DPA-Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani

Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara (performance agreement). Dalam perjanjian kinerja bupati menugaskan Direktur Puskesmas tercantum dalam DPA-Puskesmas.

Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1). Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- 2). Kinerja keuangan; dan
- 3). Manfaat bagi masyarakat.

## 12. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Puskesmas memuat:

- a. Pendapatan dan beban;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Piutang dan utang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Penatausahaan Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan. Direktur Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Puskesmas.

13. Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Evaluasi dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh bupati tingkat pencapaian hasil pengelolaan Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan diukur berdasarkan tinjauan

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pelaksanaan

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif

**I. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Puskesmas**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.370.405.336,00. Dari jumlah tersebut, pada

Anggaran belanja PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda tahun 2024 adalah Rp1.370.405.336,00.

Dengan demikian ringkas realisasi pendapatan dan belanja PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Uraian**

---

**Pendapatan - LRA**

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan dari APBD

Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan Hibah

Pendapatan Usaha Lainnya

**Jumlah pendapatan**

**Belanja**

**Belanja Operasi**

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Belanja Lain-lain

**Jumlah belanja operasi**

**Belanja Modal**

Belanja gedung dan bangunan

Belanja Tanah  
Belanja Peralatan dan Mesin  
Belanja Gedung dan Bangunan  
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Belanja Aset Tetap Lainnya  
Belanja Aset Lainnya

**Jumlah belanja modal**  
**Jumlah belanja**  
**SiLPA/(SiKPA)**

### 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian targ

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas dalam pelaksanaan progr
2. Tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas terus berke  
anggaran/biaya yang fluktuatif sesuai dengan jumlah kunjungan pasien;
3. Koordinasi antar unit dalam pembuatan laporan kinerja keuangan yang ku
4. Penatanausahaan Keuangan Puskesmas belum didukung oleh aplikasi seca

## IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan PUSKESMAS MAKRC tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua nomor 13 tentang Penyajian

### 4.1 Entitas Pelaporan

1. PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda dalam menyajikan laporan  
MAKROMAN Kota Samarinda menyajikan laporan keuangan berupa La  
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (L
2. Laporan Keuangan PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda ini sebaga
3. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meli  
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB  
entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daera  
laporan keuangan Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda dalam dua versi d

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untu pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat h kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi wala pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusu diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikel

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada sa Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui p pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertangg

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis penguk

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan se peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, ya akrual (*accrual basis*);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi d
5. Seluruh kekayaan PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda merupakan
6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptua*

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan pe kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke t tahun 2024, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam PSAP

##### 1. Kebijakan Akuntansi Aset

###### a. Aset

###### 1). Aset lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang dil dari kas dan bank, investasi jangka pendek/deposito

###### a). Kas dan Bank

Yang dimaksud kas adalah kas dan bank

Kas dan bank atau yang disetarakan dia

b). Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepa

Piutang terdiri atas piutang layanan dar  
pelaporan.

Piutang secara umum diakui sebesar nil  
sebesar nilai bersih yang dapat direalisas

Piutang disajikan dengan nilai bersih ya  
tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilak  
aset yang disajikan secara wajar dalam la  
keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidal  
*schedule* dibedakan menurut jenis piutan

c). Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah s

**Kualitas Piutang**

Lancar (Umur 0 sampai dengan 1 Tahun)  
Kurang lancar (Umur Diatas 1 sampai  
Diragukan (Umur Diatas 2 sampai deng  
Macet (Umur Diatas 5 Tahun)

Pencatatan penyisihan piutang dilakuk  
piutang tidak tertagih sesuai dengan kua

c) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam be  
barang-barang yang dimaksudkan untuk

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manf  
dan
- Pada saat diterima atau

Persediaan merupakan barang yang dap

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan bahan dan bahan laboratorium.

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir tahun.

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan metode FIFO.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan metode inventarisasi.

## 2). Aset Tetap

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan akan diperoleh oleh pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dengan cara pembelian, pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun) adalah aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah ke pemerintah. Contoh aset tetap meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jasa.

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis yang wajar (diestimasi). Terhadap aset tetap yang telah diterima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan, pemerintah mencatat penambahan, pengurangan, pengembangan dan perolehan aset tetap.

Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan aset tetap meliputi perencanaan teknis, Pengawasan atas pelaksanaan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan aset tetap, dan lain-lain.

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk tujuan pemerintah.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan dengan masa pinjaman/sewa.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang dip  
bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperole  
berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metod  
periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah  
ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metod

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain t

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan se

- a). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset  
sebagai berikut:

- 
- Aset tetap lainnya se  
lainnya sebesar Rp100.1

- b). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset t

### 3). Aset Tetap Lainnya

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelor  
Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan a  
KSO/*Built Operate and Transfer* - BOT), dan Konstruk

## 2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang adalah bertujuan mengatur pe  
transaksi masa lalu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima a  
dengan kurs mata uang Rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Kewa

### 1). Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak keti  
periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari:

- a). Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka P  
Utang jangka pendek merupakan utang  
akhir periode akuntansi berdasarkan nila

- b). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Bagian lancar utang jangka panjang m  
Pengakuan "Bagian Lancar Utang Jang

kewajiban utang jangka panjang yang ak

2). Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang "Pendapatan Diterima di Muka" dilakukan pada akhir periode berjalan.

3). Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang di muka.

4). Kewajiban Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga periode akuntansi. Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang lainnya dan utang luar negeri.

Pengakuan "Kewajiban Utang Jangka Panjang" dilakukan pada satu periode berjalan. Penilaian "Utang Jangka Panjang" berdenominasi mata uang asing harus dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan

### 3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus, yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### 4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LO adalah hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi pendapatan layanan, pendapatan kerjasama, pendapatan hibah, pendapatan jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk su

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

## 5. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam period kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang ti mata uang Rupiah.

## V. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan

### 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan

#### 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 5.1.1.1 Pendapatan - LRA

Terdiri atas:

#### Uraian

---

##### **Pendapatan**

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan dari APBD

Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan Hibah

Pendapatan Usaha Lainnya

##### *Jumlah pendapatan*

Pendapatan - LRA yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp1.370.405

##### 5.1.1.2 Belanja - LRA

Terdiri atas:

#### Uraian

---

##### **Belanja**

##### **Belanja Operasi**

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Belanja Lain-lain

##### *Jumlah belanja operasi*

##### **Belanja Modal**

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan  
 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
 Belanja Aset Tetap Lainnya  
 Belanja Aset Lainnya

*Jumlah belanja modal*

Belanja Barang yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp1.206.049.845

Belanja Peralatan dan Mesin yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp

Rendahnya realisasi anggaran peralatan dan mesin disebabkan .....

Belanja Gedung dan Bangunan yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar

**5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Terdiri atas:

Uraian	31-Des-2024
Saldo anggaran lebih awal	55,304,507.38
Penggunaan SAL	55,304,507.38
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	150,587,031.89
<i>Saldo Anggaran Lebih Akhir</i>	<b>150,587,031.89</b>

**5.1.3 Neraca**

**5.1.3.1 Kas dan setara kas**

Terdiri atas:

	31-Des-2024
Kas pada BLUD	150,587,031.89
Kas JKN	-
<i>Jumlah</i>	<b>150,587,031.89</b>

Kas dan Setara Kas terdiri dari:

Kas Tunai	
- Kas Tunai BLUD	945.00
- kas Tunai JKN	-
Kas di Bank	
- Kas di Bank BLUD	150,586,086.89
- Kas di Bank JKN	-

Kas tunai JKN merupakan kelebihan penarikan dana untuk belanja yang be

**5.1.3.2 Piutang dari Kegiatan Operasional**

Terdiri atas:

31-Des-2024

	<u>31-Des-2024</u>
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-
<b>Jumlah</b>	<u><u>-</u></u>

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum terdiri dari:

	<u>31-Des-2024</u>
Piutang BPJS Kapitasi	-
Piutang BPJS Non Kapitasi	-
Piutang Jampersal	-
<b>Jumlah</b>	<u><u>-</u></u>

### 5.1.3.3 Persediaan

Terdiri atas:

	<u>31-Des-2024</u>
Persediaan Medis:	
Obat	327,503,661.07
BHP Medis	-
Obat-Obatan Lainnya	-
<i>Jumlah persediaan medis</i>	<u>327,503,661.07</u>

Persediaan Barang Habis Pakai:

Alat Tulis Kantor	1,374,250.00
BHP Komputer	-
Alat Listrik	1,307,750.00
Alat Kebersihan	-
Benda Pos dan Materai	-
Barang Cetakan	-
Barang Fotocopy	-
BBM	-
BHP Lainnya	-
<i>Jumlah persediaan barang habis pakai</i>	<u>2,682,000.00</u>
<b>Jumlah</b>	<u><u>330,185,661.07</u></u>

### 5.1.3.4 Aset Tetap

Terdiri atas:

**Tahun 2024**

	<u>Saldo</u>
	<u>31-Des-2023</u>
<b>Biaya perolehan:</b>	
Tanah	988,067,000.00
Peralatan dan mesin	1,594,763,588.00
Gedung dan bangunan	234,917,000.00
Jalan, irigasi, dan jaringan	-
<i>Jumlah biaya perolehan</i>	<u>2,817,747,588.00</u>



Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	874,599,361.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-
Pendapatan Hibah	904,772,930.00
Pendapatan Usaha Lainnya	544,134.51
Pendapatan APBD	570,405,336.00
<i>Jumlah</i>	<u><u>2,350,321,761.51</u></u>

Sewa kantin/gedung/bangunan rs  
*Jumlah*

**5.1.4.3 Pendapatan Hibah**

Terdiri atas:

**Tahun 2018**

Diklat	
Hibah persediaan laboratorium	-

**5.1.4.2 Belanja - LO**

Terdiri atas:

**Tahun 2024**

Beban Pegawai	100,519,278.00
Beban Persediaan	220,297,737.80
Beban Jasa	879,660,545.00
Beban Pemeliharaan	40,932,868.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	33,266,600.00
Beban Perjalanan Dinas	18,212,042.00
Beban Penyusutan Aset	314,262,430.00
Beban Amortisasi	-
Beban Penyisihan Piutang	-
Beban Bunga	-
<i>Jumlah</i>	<u><u>1,607,151,500.80</u></u>

**5.1.5 Laporan Arus Kas (LAK)**

**5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Terdiri atas:

**Tahun 2024**

Arus kas masuk	1,445,548,831.51
Arus kas keluar	1,292,346,821.00
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<u><u>153,202,010.51</u></u>

**5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Terdiri atas:

	<b>Tahun 2024</b>
Arus kas masuk	-
Arus kas keluar	57,919,486.00
<b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>- 57,919,486.00</b>

#### 5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Terdiri atas:

	<b>Tahun 2024</b>
Ekuitas awal	1,647,566,812.38
Surplus/defisit-LO	743,170,260.71
Koreksi Saldo Awal	318,608,185.87
Lain-lain	-
<b>Ekuitas akhir</b>	<b>2,709,345,258.96</b>

#### **Koreksi Ekuitas Lain-lain dapat dijabarkan sebagai berikut:**

1. Koreksi Saldo Awal Aset Tanah sebesar
2. Koreksi Saldo Awal Aset Peralatan dan Mesin sebesar
3. Koreksi Saldo Awal Aset Gedung dan Bangunan sebesar
4. Koreksi Saldo Persediaan
5. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan sebesar

**Total Koreksi Ekuitas Lain-lain**

## I. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

### 6.1 Sejarah Pendirian

PUSKESMAS MAKROMAN merupakan salah satu Puskesmas pemerintah yang berada di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, beroperasi dan diresmikan pada . Secara administratif Puskesmas Makroman berada di Kecamatan Kesehatan Kota Samarinda.

PUSKESMAS MAKROMAN berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

### 6.2 Produk Layanan

Sebagai wahana pelayanan, PUSKESMAS MAKROMAN memberikan pelayanan kepada

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0  
10 0  
11 0

### 6.3 Tempat Kedudukan

PUSKESMAS MAKROMAN beralamat di Jl.Sekolahan , Desa/Kelurahan Makroman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

### 6.4 Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

**Visi:**

0

**Misi:**

0

0

0

0

0

0

**Motto:**

0

NPWP: 00.279.645.6-722.000

### 6.5 Pejabat Pengelola

Susunan pejabat pengelola keuangan berdasar pada sebagai berikut:

Kepala Puskesmas selaku KPA :  
Kepala Tata Usaha :  
Bendahara Penerimaan :  
Bendahara Pengeluaran :

### 6.6 Kepegawaian

Terdiri atas:

PNS

Non PNS

**Jumlah Pegawai**

## V Penutup

Pelaporan keuangan dibuat untuk mencapai akuntabilitas pelaporan keuangan daerah sebagai wu

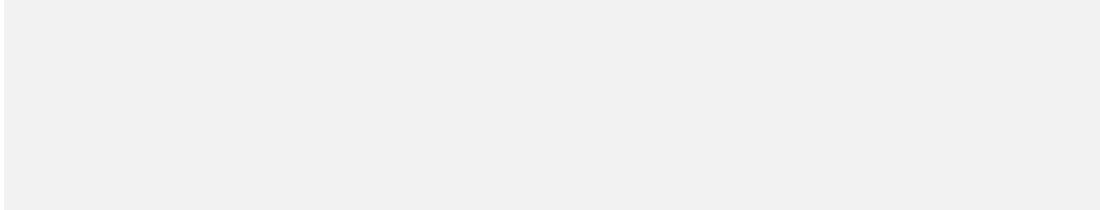
periode pelaporan tahun 2024. Laporan Keuangan yang dibuat oleh PUSKESMAS MAKROMAN (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas:

Laporan yang disusun oleh PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda sesuai dengan Standar / disajikan dengan menganut prinsip akuntabilitas, relevansi dan transparansi.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.445.548.831,51 dari
2. Total realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.350.266.307,00 dari anggaran be
3. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.350.321.761,51.
4. Total realisasi beban tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.607.151.500,80.
5. Nilai aset yang dikuasai PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda per 31 Desember per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.647.566.812,38.
7. Nilai Ekuitas yang dimiliki PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda per 31 Desem

Demikian laporan Keuangan PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda Berbasis Akrua Ta berkepentingan.



LAS MAKROMAN  
SAMARINDA

### LAPORAN KEUANGAN

Berakhir dan Posisi Tanggal  
4 DAN 31 DESEMBER 2023

---

nsparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu n tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode n omni yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional BLUD, menilai kondisi keuangan, n tukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

up untuk membiayai seluruh pengeluaran;  
konomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

lalam kegiatan Puskesmas serta hasil-hasil yang dicapai;  
n i kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;  
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

as apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

embaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

;ai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik donesia nomor 4437);

i tahun 2005 nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang tahun 2012 nomor 171);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140);

perintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan ); dan

nan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1213 tahun 2018).

n Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan  
l 31 Desember 2019 sesuai dengan peraturan tersebut.

inda Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

Akrual Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

an  
igan  
ng Ada dalam PSAP

ngan

ih (LPSAL)

l

erasi  
estasi  
idanaan  
nsitoris

perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil ; baik perlu menggunakan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat uitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten/kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku harga pada tahun tersebut, sedangkan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa rlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

digunakan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dapat dicapai. tau perbaikan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan peningkatan produksi *ion factor* ), dimana faktor perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan.

ibagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk Negara Indonesia dibagi dalam dua bagian yaitu pertumbuhan

**ito (PDRB) per Kapita  
nda**

<b>isar Harga Berlaku</b>	<b>%</b>
),362,200,000,000	
74,077,810	<b>-100.00%</b>
79,950,970	<b>7.93%</b>
80,363,210	<b>0.52%</b>

85,597,080	7.06%
99,824,150	24.22%

---

ng diberikan kepada masyarakat.

menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.

t anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

rikat, APBD dan APBN dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Puskesmas sesuai RBA.

g kas Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain Puskesmas. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada BPKAD setiap triwulan.

a.

pada BPKAD setiap triwulan. Pengeluaran Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan

esmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala

rtimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-  
tahuan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

ion APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas.

lan  
dapatkan tambahan.

kas Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Puskesmas.

enyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan

lan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan  
mas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

skan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Puskesmas. Penagihan  
pada bupati dengan dilampiri buktl-bukti valid dan sah.

ejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang  
tentuan peraturan perundang-undangan.

rgan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman/utang dapat berupa  
jang.

nis, transparan dan bertanggung jawab.

aman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan

anjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan

Puskesmas. Hak tagih pinjaman/utang Puskesmas menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang matang. Jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

ah jatuh tempo. Kepala Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang RBA.

meningkatkan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas isi jangka panjang.

i dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat

) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

rsetujuan bupati.

kum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

t melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,

gan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian

kaian barang Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau  
cara berkala.

kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Puskesmas dengan tidak mengurangi

s dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

1 ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan  
inatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

bebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa

per dananya berasal dari:

dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan disetujui bupati.

kesmas harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses  
ebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas.

: dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan  
beri hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

k oleh Direktur Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau  
yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang

prinsip:

etik integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, dan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.

nya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan pelaksanaan pengadaan lain.

yang diatur dalam peraturan bupati.

ada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang-barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

kan pendapatan Puskesmas. Hasil penjualan barang inventaris dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang.

h dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

an berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penjualan aset tetap harus secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap

ugas dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan bupati melalui sekretaris daerah.

daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan bupati.

apangan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

berikutnya kecuali atas permintaan bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan

lapangan dengan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

hun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

m atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

ncakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima i memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang n atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang ada atau mungkin timbul.

kukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal

nerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian

rusunan RBA dan evaluasi kinerja.

a Rencana Strategis Bisnis (RSB). Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, in pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, innya. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Puskesmas dengan

si dengan RKA Dinas Kesehatan.

ian minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

aya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh  
hasilkan.

ng dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti

ran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana

se perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan

ngan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan  
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

eluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

. Pemerintah Daerah merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan

inas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan. RKA Dinas Kesehatan beserta RBA

disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD dan Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah menjadi Peraturan Daerah, Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan dalam usulan DPA-Puskesmas untuk diajukan kepada BPKAD.

in  
an dihasilkan.

Penetapan anggaran. Pengesahan DPA-Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dilakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Puskesmas tahun sebelumnya. DPA-Puskesmas merupakan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana dilakukan dengan jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang telah ditetapkan dalam DPA-Puskesmas.

Penandatanganan oleh Walikota dengan Kepala UPTD Puskesmas.

Perjanjian antara Walikota dan Kepala UPTD Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement) Puskesmas untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang

n bisnis yang sehat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. smas. Penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada BPKAD.

ati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur alam RSB dan RBA.

gkat kemampuan Puskesmas dalam:  
rikan (rentabilitas);

ngeluaran.  
elangan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

kota Samarinda dapat diuraikan sebagai berikut: Anggaran pendapatan PUSKESMAS MAKROMAN Kota da tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.445.548.831,51 atau tercapai 00,00% dari pagu yang telah ditetapkan.

.425.709.843,38. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.350.266.307,00 atau sebesar 0,00%.

√ Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
800,000,000	874,599,361	109.32
570,405,336	570,405,336	100.00
-	-	-
-	-	-
-	544,135	-
<b>1,370,405,336</b>	<b>1,445,548,832</b>	<b>105.48</b>
139,660,000	100,519,278	71.97
1,206,049,843	1,191,827,543	98.82
-	-	-
-	-	-
<b>1,345,709,843</b>	<b>1,292,346,821</b>	<b>96.03</b>

- #DIV/0!

-	-	-
80,000,000	57,919,486	72.40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>80,000,000</b>	<b>57,919,486</b>	<b>72.40</b>
<b>1,425,709,843</b>	<b>1,350,266,307</b>	<b>94.71</b>
<b>(55,304,507)</b>	<b>95,282,525</b>	<b>-</b>

Metode yang telah ditetapkan oleh PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Metode atau kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas;

2. Metode yang harus tetap tersediannya kebutuhan operasional yang sulit untuk diprediksi serta besarnya

3. Metode yang optimal; dan

4. Metode yang menggunakan komputer secara maksimal sehingga menghambat dalam proses penyusunan Laporan Puskesmas.

PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda Berbasis Akruwal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Metode akuntansi keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Laba Rugi (LKR), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Metode akuntansi entitas pelaporan yang tidak dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda; dan

Metode akuntansi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Kepala Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan dimana keduanya menggunakan basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Metode akuntansi pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk

ak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat upun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan

n berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas uarkan.

at terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan terima atau dibayar.

ada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus unjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan uran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

cara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap

itu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar

n tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;

an hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda;

. kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kota Samarinda per 1 Januari 2024; dan

l).

rhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas tahun buku berikutnya. PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda dalam menyusun Laporan Keuangan 13 tahun 2006.

harapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri berjangka, piutang, persediaan dan belanja dibayar di muka.

. merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

kui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.

da pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

1 piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal

ai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau ikan (*net realizable value*).

ng dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan cukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan

k tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging g*, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

ebagai berikut:

<b>Taksiran Piutang Tak Tertagih</b>
0.50%
10%
50%
100%

an pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan litas piutangnya.

entuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan : dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

faat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

1 hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

at dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

ersediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makan pokok, alat listrik, oksigen, bahan radiologi

akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.

dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil

ai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh OPD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal (modal berjalan), sedangkan aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, jaringan dan instalasi.

perolehan atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima secara penuh. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penggantian utama.

perolehan atas suatu aset yang pelaksanaannya dilakukan secara kontrak (bukan swakelola) adalah: biaya pekerjaan dan biaya konstruksi. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan keuangan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Kontra aset tetap yang berhubungan.

ditan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan

perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset rusak atau mati.

an sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset

diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang h setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku

le garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing

1 metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur e ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

anah dan konstruksi dalam pengerjaan.

bagai berikut:

tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya

erti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap 000,00 ke atas.

etap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

mpokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain yaitu ngsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan), kemitraan dengan pihak ketiga (Kerja Sama Operasi – si Dalam Pengerjaan.

rlakukan akuntansi kewajiban. Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat tau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat jiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang).

iga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu

endeck Lainnya

pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada i sekarang kas yang akan dibayarkan.

erupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. aka Panjang" dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah

an jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak BLUD pada periode yang bersangkutan. Pengakuan e akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode

tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja dan pendapatan diterima

ga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu zka panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, pihak ketiga

a akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari sarkan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk "Utang Jangka Panjang" dalam rkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

aset dan kewajiban Puskesmas pada tanggal laporan.

bahan Ekuitas (LPE).

/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain

itas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

menurut sumber pendapatan untuk Puskesmas dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu n APBN/APBD dan pendapatan usaha lainnya. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut

mber daya ekonomi.

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

le pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

mbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
800,000,000.00	874,599,361.00	109.32
570,405,336.00	570,405,336.00	100.00
-	-	-
-	-	-
-	544,134.51	-
<b>1,370,405,336.00</b>	<b>1,445,548,831.51</b>	<b>105.48</b>

336,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp1.445.548.831,51 atau tercapai 0,00%.

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		%
139,660,000.00	100,519,278.00	#REF!	71.97
1,206,049,843.38	1,191,827,543.00		98.82
-	-		-
-	-	#REF!	-
<b>1,345,709,843.38</b>	<b>1,292,346,821.00</b>		<b>96.03</b>

-	-	#REF!	-
80,000,000.00	57,919,486.00	#REF!	72.40

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>80,000,000.00</b>	<b>57,919,486.00</b>	<b>72.40</b>

3,38 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp1.191.827.543,00 atau tercapai 0,00%.

80.000.000,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp57.919.486,00 atau tercapai 0,00%.

Rp0,00 tidak terealisasi disebabkan .....

31-Des-2023	Rp	Kenaikan/ Penurunan	%
16,266,667.00	39,037,840.38		239.99
16,266,667.00	39,037,840.38		239.99
55,304,507.38	95,282,524.51		172.29
<b>55,304,507.38</b>	<b>95,282,524.51</b>		<b>172.29</b>

31-Des-2023	Rp	Kenaikan/Penurunan	%
55,304,507.38	95,282,524.51		172.29
-	-		-
<b>55,304,507.38</b>	<b>95,282,524.51</b>		<b>172.29</b>

lum dikembalikan ke rekening JKN. Saldo tersebut digunakan pada tahun 2021.

31-Des-2023	Rp	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

31-Des-2023	Rp	Kenaikan/Penurunan	%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

31-Des-2023	Rp	Kenaikan/Penurunan	%
-	327,503,661.07	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	327,503,661.07	-	-

4,299,375.00	-	2,925,125.00	(68.04)
-	-	-	-
47,475.00	-	1,260,275.00	2,654.61
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
369,500.00	-	369,500.00	(100.00)
4,716,350.00	-	2,034,350.00	(43.13)
<b>4,716,350.00</b>	<b>-</b>	<b>325,469,311.07</b>	<b>6,900.87</b>

Tambah	Mutasi	Kurang	Saldo
			31-Des-2024
-	-	-	988,067,000.00
156,845,223.00	-	-	1,751,608,811.00
198,517,200.00	-	-	433,434,200.00
599,926,618.00	-	-	599,926,618.00
<b>955,289,041.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,773,036,629.00</b>

	244,343,908.00		1,255,068,541.00
	9,525,860.00		244,442,860.00
	59,992,662.00		59,992,662.00
	<u>313,862,430.00</u>	<u>-</u>	<u>1,559,504,063.00</u>
			<u>2,213,532,566.00</u>

0.000

al dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp3.910.000,00 dan Beban Penyusutan Peralatan berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp86.984.565,67 dan Beban Penyusutan

31-Des-2023	Rp	Kenaikan/Penurunan	%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

aan bersih PUSKESMAS MAKROMAN yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban PUSKESMAS

Tahun 2023	(Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1,456,378,972.01	191,187,840.37		13.13
191,187,840.37	551,982,420.34		288.71
-	-		-
-	318,608,185.87		-
-	-		-
-	-		-
<u>1,647,566,812.38</u>	<u>1,061,778,446.58</u>		<u>64.45</u>

Tahun 2023	(Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
------------	------	--------------------	---

780,507,928.38	94,091,432.62	100.00
-	-	-
-	904,772,930.00	-
-	544,134.51	-
756,065,795.00	- 185,660,459.00	(24.56)
<b>1,536,573,723.38</b>	<b>813,748,038.13</b>	<b>52.96</b>
-	-	-
-	-	-

Tahun 2017	(Rp)	Kenaikan/Penurunan %
-	-	-
-	-	#DIV/0!

Tahun 2023	(Rp)	Kenaikan/Penurunan %
64,566,924.00	35,952,354.00	55.68
500,287,620.01	- 279,989,882.21	(55.97)
455,742,270.00	423,918,275.00	93.02
81,427,000.00	- 40,494,132.00	(49.73)
16,589,550.00	16,677,050.00	100.53
-	18,212,042.00	-
226,772,519.00	87,489,911.00	38.58
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>1,345,385,883.01</b>	<b>261,765,617.79</b>	<b>19.46</b>

Tahun 2023	(Rp)	Kenaikan/Penurunan %
1,237,769,928.38	207,778,903.13	16.79
1,067,125,006.00	225,221,815.00	21.11
<b>170,644,922.38</b>	<b>- 17,442,911.87</b>	<b>(10.22)</b>

Tahun 2023	(Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
-	-		
131,607,082.00	- 73,687,596.00		(55.99)
<b>- 131,607,082.00</b>	<b>73,687,596.00</b>		<b>(55.99)</b>

Tahun 2023	(Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1,456,378,972.01	191,187,840.37		13.13
191,187,840.37	551,982,420.34		288.71
-	-		100.00
<b>1,647,566,812.38</b>	<b>1,061,778,446.58</b>		<b>64.45</b>

Rp -  
Rp -  
Rp -  
Rp 318,608,186  
Rp -  
**Rp 318,608,186**

a di daerah Kota Samarinda yang beralamat di Jl.Sekolahan , Desa/Kelurahan Makroman, Kec. Sambutan, Kota Administratif, PUSKESMAS MAKROMAN merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas

sarkan 994/670/HK-KS/XII/2022 dan dalam tata kelolanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

la masyarakat, antara lain:

ec. Sambutan, Kota

**16-Jul-05**

---

0  
0  
0  
0

**31 Desember 2024**

---

31 orang  
42 orang  
**73 orang**

jud petanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan kepada Badan Keuangan Daerah selama

I, Kota Samarinda meliputi; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Laporan

anggaran PUSKESMAS MAKROMAN Kota Samarinda atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan

anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.370.405.336,00.

Belanja yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp1.425.709.843,38.

Per 2024 sebesar Rp2.709.345.258,96 mengalami kenaikan sebesar Rp1.061.778.446,58 dari nilai yang disajikan

per 2024 sebesar Rp2.709.345.258,96.

Laporan Anggaran 2024 ini kami susun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang

